

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

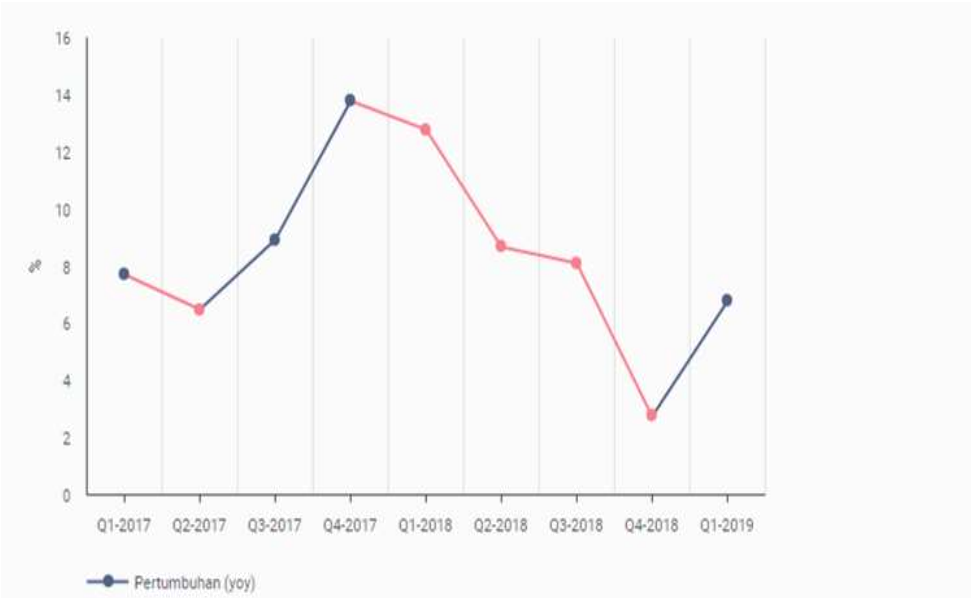
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa. Salah satu indikator kemandirian terhadap suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan yang tercermin dalam APBN ataupun APBD. Untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab bernegara, bagi para wajib pajak, maka peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa dikaji serta disesuaikan dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada Masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft*, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*. Perlu diketahui, bahwa manusia hidup bermasyarakat masing-masing (individu) membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat. Artinya, ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Perlu diketahui juga dalam hal ini ada pembatasan hak-hak asasi manusia oleh masyarakat.[1]

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegak hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Dalam hal perpajakan,

masyarakat juga harus memahami serta mematuhi wajib pajak, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara. Pajak didefinisikan sebagai sebuah iuran atau pungutan wajib pajak yang patut dibayar rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tidak adanya timbal balik serta digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat [2].

Maraknya fenomena manajemen laba *earnings management* yang terjadi menandakan bahwa tindakan manajemen laba masih banyak ditemukan di berbagai perusahaan terutama pada perusahaan sektor manufaktur, salah satu fenomena manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia terjadi pada PT Kimia Farma dimana bermula dari tahun 2002, perusahaan melakukan kesalahan pencatatan pada penjualan yang mengakibatkan overstated laba senilai Rp 32,7 miliar untuk period akuntansi di Tahun 2001. Jumlah laba yang dilaporkan sebelumnya adalah Rp 132 miliar dan setelah dilakukan audit kembali, laba perusahaan hanya sebesar Rp 99,5 miliar. Fenomena lainnya terkait praktik manajemen laba adalah pada PT. Ades Alfindo Tbk. Berita ini mulai terkuak saat manajemen baru PT. Ades Alfindo Tbk menemukan adanya inkonsistensi pencatatan pada penjualan periode 2001-2004. Sebelumnya pada Juni 2004 sempat terjadi perubahan manajemen dengan masuknya Water Partners Bottling Co (perusahaan group The Coca Cola Company dan Nestle SA) yang kepemilikan sahamnya sebesar 65,07%. Pergantian pemilik inilah yang berhasil menguak inkonsistensi pencatatan dalam laporan keuangan periode 2001-2004 dengan indikasi dilakukan oleh manajemen sebelumnya. Berdasarkan penyelidikan ditemukan setiap

kuartal angka penjualan lebih tinggi antara 0,6-3,9 juta galon dibanding angka produksi. Manajemen baru juga melaporkan angka penjualan riil pada tahun 2001 yang diperkirakan lebih rendah Rp. 13 miliar dari yang dicatat. Sementara tahun 2002 perbedaan angka mencapai Rp. 45 miliar, dan pada tahun 2003 senilai Rp. 55 miliar. selanjutnya enam bulan pertama tahun 2004 selisih yang terjadi diperkirakan mencapai Rp. 2 miliar. Kesalahan tersebut tidak terdeteksi dari pengamatan publik karena PT. Ades Alfindo Tbk tidak memasukkan volum penjualan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Sebagai akibatnya, laporan keuangan yang disajikan pada periode 2001-2004 lebih tinggi dari yang seharusnya dilaporkan. Kedua fenomena di atas menunjukkan bahwa praktik manajemen laba bukanlah hal yang baru ditengah dunia bisnis di Indonesia [2].



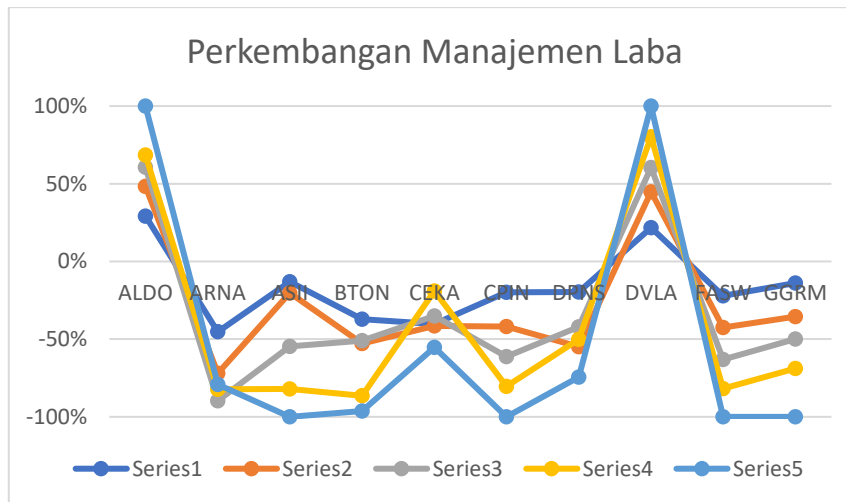
Gambar 1.1
Pertumbuhan Sektor Industri Makanan dan Minuman 2019-2023
Sumber : (Statistik, 2023)

Data di atas merupakan data pertumbuhan ekonomi industri sub sektor makanan dan minuman tahun 2017-2019. Berdasarkan data pertumbuhan di atas bahwa penurunan pada sektor makanan dan minuman telah dirasakan sejak tahun 2018. Pertumbuhan pada sektor ini dirasakan terus menurun sejak mencapai level tertinggi pada kuartal ke-IV tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 13,77%. Sedangkan pada kuartal I tahun 2019, sektor makanan dan minuman tumbuh sebesar 6,77%. Walaupun tumbuh lebih tinggi dibandingkan pada kuartal ke IV tahun 2018, pertumbuhan kuartal pertama tahun 2019 merupakan pertumbuhan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurunnya kinerja emiten-emiten pada sub sektor makanan dan minuman sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi sub sektor makanan dan minuman.

Manajemen laba yaitu seni untuk bertujuan mengutak atik angka di laporan keuangan sebuah Perusahaan hal ini dilakukan oleh para manajer agar laporan keuangan terlihat cantik, menarik dan meyakinkan bagi para pemangku kepentingan akan tetapi hal ini dianggap keburukan karena laporan tidak menunjukkan dimana kondisi Perusahaan yang sebenarnya maka manajemen laba yang dapat menyebabkan keterpurukan sampai mengalami sebuah kebangkrutan dalam suatu bisnis dalam perusahaan [3].

Fenomena lainnya mengenai manajemen laba dibuktikan pada beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dirangkai dari rumus manajemen laba tersebut, dan menarik penelitian untuk meneliti lebih lanjut.

Dara yang diperoleh pada laporan keuangan tahunan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Gambar 1.2
Perkembangan Manajemen Laba beberapa Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023

Tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan dalam periode berjalan tanpa menimbulkan dampak pada penurunan ataupun kenaikan laba ekonomis dalam jangka Panjang. Semakin tinggi manajemen laba dalam perusahaan, maka semakin tinggi konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent. Oleh karenanya, manajemen selalu berusaha menonjolkan prestasinya melalui pencapaian laba yang dicapai. Dalam prakteknya, manajemen termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui sebuah penghargaan contohnya bonus gaji, pengangkatan jabatan dimana imbalan ini diberikan atas kinerja laba perusahaan. Jika intesif ini diberikan kepada manajemen

maka manajemen akan tergoda untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya sendiri dan mengesankan para pemangku kepentingan mengenai kinerja yang baik yang dicerminkan oleh manajemen laba. Terdapat pola dalam manajemen laba: (1) *taking a bath* pola ini terjadi ketika dalam perusahaan terjadi pergantian manajemen; (2) *income minimazion* dilakukan pada saat perusahaan mendapatkan profitabilitas tinggi sehingga pada periode mendatang labanya diperkirakan turun agar tidak mendapat perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan; (3) *income maximization* dilakukan dengan menjadikan laba pada periode berjalan lebih tinggi dari perolehan laba sebenarnya. Tujuannya pola ini adalah agar manajer memperoleh bonus besar; (4) *income smoothing* dilakukan dengan cara perataan laba yaitu laba dari periode ke periode relatif konsisten karena investor cenderung lebih respek jika labanya stabil [4].

Perencanaan pajak merupakan salah satu insentif pajak yang mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. *Tax planning* perencanaan pajak dalam hubungannya dengan manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. *Tax planning* (perencanaan pajak) muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan kepentingan itu terletak pada perusahaan yang berusaha membayar pajak seminimal mungkin agar tidak mengurangi laba yang telah diperolehnya, sementara pemerintah mengandalkan pembayaran pajak dari perusahaan untuk mendanai pengeluaran negara. Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Perusahaan yang ingin melakukan *tax planning* (perencanaan pajak)

guna memperkecil beban pajak secara otomatis meninjau labanya karena laba tersebut merupakan dasar dari pengenaan pajak. Jika didapatkan laba yang tinggi, perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan meminimalkan laba *income minimization* yang diperoleh agar beban pajaknya rendah. Penelitian menyatakan bahwa *tax planning* (perencanaan pajak) memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.

Setiap perusahaan terkhususnya bank dalam melakukan operasi tentunya menginginkan peningkatan laba setiap tahunnya, sejalan dengan persaingan perbankan yang semakin meningkat di Indonesia. Salah satu kasus manajemen laba pada sektor perbankan yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu pada Bank Bukopin di tahun 2018. Jakarta –Bank Bukopin merevisi laba bersih pada tahun 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari yang sebelumnya sebesar Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar terdapat pada bagian pendapatan provinsi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin BSB terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitor. Insiden modifikasi data kartu kredit ini memaksa BankBukopin menyiapkan *action plan* untuk menyehatkan CAR *Capital Adequacy Ratio* atau rasio kecukupan modal ke level 14%. Langkah yang dilakukan ialah right issue dengan menerbitkan saham baru sebesar 30% dan divestasi 40% saham Bank Syariah Bukopin.

Upaya Perusahaan untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba ini telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan kinerja manajemen yang sesungguhnya. Faktor yang mempengaruhi manajemen laba salah satunya ialah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan metode yang digunakan oleh manajemen Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak penghasilan dengan kerangka tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh pada manajemen laba. [5]

Perencanaan pajak bisa memperluas manfaat sehingga meningkat pula nilai perusahaannya. Salah satu cara mengetahui nilai perusahaan adalah dengan melihat harga sahamnya. Jika penawaran perusahaan memiliki harga saham yang tinggi, artinya para investor juga makmur. Agar bisa memperoleh penawaran harga saham tinggi, deviden yang besar wajib diberikan oleh perusahaan. Deviden diperoleh berdasarkan laba yang lebih besar. Salah satu yang menjadi usaha membangun laba adalah melalui perencanaan pajak. Menghasilkan keuntungan melalui pembayaran pajak yang rendah, sehingga perusahaan mendapat keuntungan yang besar. Dapat menggambarkan bahwa nilai perusahaan meningkat jika perusahaan mendapat laba yang besar. [6]

Beban pajak tangguhan *tax expense* merupakan total agregat pajak masa kini *current tax* dan pajak tangguhan *deferred tax* yang telah dihitung dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan yang diakui sebagai beban atau penghasilan. Pajak kini

adalah total pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada periode tahun berjalan, sementara itu pajak tangguhan adalah total pajak penghasilan terutang yang diakui untuk periode mendatang karena terjadi perbedaan temporer antara laba akuntansi dan fiskal menurut peraturan perpajakan. Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari pajak penghasilan PPh di masa yang akan datang yang timbul akibat perbedaan *temporer* antara laba akuntansi dan laba fiskal menurut perpajakan, serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu. Dampak adanya pajak penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. (Andro Trijovianto, 2021)

Beban pajak tangguhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan waktu pengakuan biaya dalam akuntansi dan dalam laba fiskal. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan temporer kena pajak *taxable temporary differences* dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan *deductible temporary differences*. Sehingga akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan memunculkan aktiva pajak tangguhan *deffered tax asset*. Dengan demikian, penurunan aktiva pajak tangguhan menunjukkan adanya beban pajak tangguhan pada laporan keuangan tahun berjalan. Sedangkan perbedaan permanen merupakan perbedaan yang bersifat tetap, tidak akan terpengaruh oleh apapun juga atau hilang sejalan dengan waktu. [7]

Fenomena lain terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), sangkaan nominal Account Receivable 6 (enam) emiten yang bermufakat bersama AISA sengaja digelembungkan. Total nilai piutang yang digelumbungkan sekitar Rp 3 triliun. Penggelembungan nilai piutang tersebut terkait dengan penjualan yang dilakukan AISA. Ketika piutang Perusahaan meingkat, maka penjualan perusahaan juga meningkat. Fenomena terjadi ketika penyajian keuangan entitas tidak disajikan sesuai dengan ketentuan kinerja entitas sehingga mempengaruhi reputasi, kepercayaan dan keandalan laporan keuangan.[8]

Aset pajak tangguhan adalah salah satu faktor umum penyebab tindakan manajemen laba, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan temporer yang mengakibatkan terpulihkannya jumlah pajak diperiode mendatang. Perbedaan temporer terjadi pada saat terdapat penyesuaian suatu perilaku dalam perpajakan menurut akuntansi dan ketentuan perpajakan. Aturan yang terdapat dalam perpajakan mewajibkan perusahaan agar melakukan penyesuaian terhadap laba fiskal perusahaan yang diakibatkan oleh perbedaan konsep serta cara yang digunakan untuk mengukur pendapatan dan biaya, yang akan menyebabkan selisih antara jumlah laba akuntansi dengan jumlah laba fiskal [9].

Aset pajak tangguhan yang besarannya ditingkatkan manajemen dilatarbelakangi oleh beban politik pada ukuran perusahaan, pemberian bonus dan minimalisasi pajak pembayaran agar perusahaan tidak merugi. Akan tetapi risiko yang ditanggung industri juga sangat tinggi karena perusahaan harus membayar dengan jumlah yang lebih tinggi. Fenomena manajemen laba telah memunculkan

beberapa kasus yang terkenal dan terungkap di berbagai perusahaan di Indonesia yakni PT Garuda Indonesia dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Kasus pada PT. Garuda Indonesia yang pada tahun 2018 membukukan laba bersih US\$ 809.846 dibandingkan yang mengalami kerugian US\$216,58 juta pada tahun 2017 memicu kontroversi. Komisaris melalui Trans Airways menolak laporan keuangan ini dengan alasan transaksi senilai US\$239,94 juta dengan mahata terlampau besar dan akan berpengaruh terhadap neraca keuangan Garuda Indonesia. [5]

Aset pajak tangguhan yang nilai nominalnya dibesarkan oleh manajemen perusahaan dilatar belakangi oleh motivasi adanya pemberian bonus, sehingga manajemen perusahaan akan termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba. Semakin besar nilai aset pajak tangguhan, maka semakin tinggi juga peluang manajer perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba. Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat menjadi faktor dalam praktik manajemen laba. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai total aset yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks juga aktivitas operasionalnya sehingga perusahaan cenderung akan melakukan praktik manajemen laba agar dapat memberikan hasil kinerja yang baik kepada pihak investor maupun *stakeholder*. Semakin besar total aset yg dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga modal yang disetor. Dengan banyaknya modal perusahaan, maka akan semakin meningkatkan aktivitas perusahaan, sehingga akan menyebabkan semakin banyaknya perputaran uang, kemudian kapitalisasi pasar menjadi semakin besar juga dan menyebabkan perusahaan akan semakin dikenal dikalangan Masyarakat.[10]

Leverage merupakan gambaran atas pemakaian hutang suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Pengelolaan leverage sangatlah penting, sebab keputusan dalam penggunaan hutang yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dikarenakan adanya pengurangan atas pajak penghasilan. Perusahaan yang menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap (beban tetap). Ada hal lain yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu transparansi perusahaan yang penulis jadikan sebagai variabel moderasi. Transparansi perusahaan sering diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik itu dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Transparansi dapat meningkatkan ketepatan informasi publik yang tersedia untuk investasi, dan untuk keputusan manajemen. Sehingga dengan meningkatkan tingkat transparansi dari laporan tahunan perusahaan yang akan diberikan kepada investor, seharusnya dapat meredam dampak buruk yang akan dirasakan oleh perusahaan atas keputusan investasi dari investor.[2]

Salah satu penyebab manajemen laba adalah *leverage*. Dengan adanya *leverage* hal itu dapat menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. *Leverage* diukur dengan cara perbandingan total hutang dengan total aset. Salah satu sumber alternatif dana perusahaan selain menjual saham di pasar modal adalah melalui sumber dana *eksternal* dalam bentuk hutang. Perusahaan akan berusaha untuk memenuhi perjanjian utang untuk mendapatkan penilaian yang baik dari kreditor. Motivasi perusahaan untuk membuat manajemen laba adalah untuk

memenuhi kebutuhan pendanaan *eksternal* dan memenuhi perjanjian utang. Selain *leverage*, faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba adalah *sales growth*. Variabel ini digunakan dalam model penelitian untuk mengetahui kasus perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi akan menghasilkan asimetri informasi. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan dalam manajemen laba. Kemudian, ukuran perusahaan mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam manajemen laba dan perusahaan kecil lebih mampu menyimpan informasi rahasia perusahaan daripada perusahaan besar. Penelitian lain telah menemukan bukti bahwa perusahaan besar memiliki motivasi yang lebih rendah perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh investor dan pemerintah yang merasa lebih mudah untuk meneliti perusahaan besar. Sebaliknya, hasil penelitian lain membuktikan bahwa perusahaan besar memiliki motivasi yang lebih besar dalam praktik manajemen laba.[11].

Leverage adalah perbandingan total kewajiban dengan total asset perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin tingginya resiko pada kreditur berupa ketidak mampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. Dengan demikian, perusahaan cenderung akan menampilkan kinerja yang baik dengan melakukan manajemen laba untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur akan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. PT Indofarma Tbk yang dipublikasikan Senin (8/11/2004). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan PT Indofarma. Dari hasil penelitian, Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) menemukan bukti-bukti di antaranya, nilai Barang Dalam Proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya *overstated* dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp 28,87 miliar. Akibatnya harga Pokok Penjualan mengalami *understated* dan laba bersih mengalami *overstated* dengan nilai yang sama.[12]

Penelitian ini mengacu pada penelitian Uum Helmina Chaerunnisak & Feby Febriani (2022) yang membahas mengenai pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan asimetri informasi terhadap manajemen laba: studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Uum Helmina Chaerunnisak & Feby Febriani (2022) adalah adanya penambahan variabel asset pajak tangguhan dan adanya variabel moderasi berupa leverage.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Tax Planning*, Beban Pajak Tangguhan Dan Asset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Banyak pelaku usaha sengaja memanajemen laba dalam laporan keuangan menjadi kecil serta mengoptimalkan beban yang dikeluarkan, hal tersebut dilakukan agar pajak yang disetorkan ke kas negara berkurang.
2. Penyajian keuangan entitas tidak disajikan sesuai dengan ketentuan kinerja entitas sehingga mempengaruhi reputasi, kepercayaan dan keandalan laporan keuangan.
3. Kecendrungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan.
4. Adanya manipulasi aktivitas operasi Perusahaan dalam merencanakan pajaknya.
5. Adanya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggelapkan pajak.
6. Informasi dalam laporan keuangan terlebih mengenai laba juga sering menjadi target rekayasa melalui tindakan pemikiran manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya.
7. Perusahaan berukuran kecil lebih banyak melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan berukuran besar.
8. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara tetapi pada perusahaan pajak merupakan beban yang dimitigasi karena mengurangi laba bersih.

9. Terjadinya tindakan manajemen manipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba.
10. Adanya kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dengan memodifikasi laba sehingga nilai laba tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai Pengaruh Tax Planning (X1), Beban Pajak Tangguhan (X2) dan Aset Pajak Tangguhan (X3) terhadap Manajemen Laba (Y) dengan Leverage (Z) sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Tax Planning terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh Tax Planning terhadap Manajemen Laba Melalui

Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2019- 2023?

5. Bagaimana pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Melalui Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh Aset Pajak Tangguhan Tax Planning terhadap Manajemen Laba Melalui Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diatas maka penelitia ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tax Planning terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
2. Untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
3. Untuk mengetahui pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
4. Untuk mengetahui pengaruh Tax Planning terhadap Manajemen Laba Melalui Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

Periode 2018- 2023?

5. Untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Melalui Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?
6. Untuk mengetahui pengaruh Aset Pajak Tangguhan Tax Planning terhadap Manajemen Laba Melalui Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2018-2023?

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan pengaruh profitabilitas, thin capitalization dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan political connection sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai profitabilitas, thin capitalization dan ukuran perusahaan terhadap keputusan penghindaran pajak, sehingga membantu manajemen perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian- penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penghindaran pajak khususnya tentang profitabilitas, thin capitalization dan ukuran perusahaan.

